

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI DESA WEDI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Oktavia Putri Mandasari

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

viaokta76447@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.,

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

indahprabawati@unesa.ac.id

Abstrak

Desa Wedi Kecamatan Kapas merupakan salah satu kawasan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bojonegoro dengan komoditi unggulan buah salak. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mendukung peningkatan potensi kawasan pedesaan berbasis tanaman hortikultura dan upaya untuk memperkecil kesenjangan pembangunan perkotaan dan pedesaan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pelaksanaan kebijakan terdapat beberapa kendala yang mengarah pada satu masalah krusial yaitu penurunan jumlah produksi buah salak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun telah dilaksanakan sesuai rencana tetapi masih diperlukan perbaikan di beberapa aspek agar tujuan dari kebijakan bisa tercapai secara maksimal. Saran yang bisa dimunculkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengelola kebun salak dengan ideal, meningkatkan manajemen produksi dan teknologi budidaya salak, perbaikan sistem irigasi kebun salak, memperkuat usaha agribisnis dengan membentuk badan usaha resmi dan mengoptimalkan agrowisata dengan konsep *Community Based Tourism*.

Kata Kunci: Implementasi, Pengembangan, Agropolitan

Abstract

Wedi Village in Kapas Subdistrict is one of the implementation areas of the Agropolitan Area Development policy in Bojonegoro Regency with superior commodity of salak fruit. This policy was implemented to support the increase in the potential of horticultural-based rural areas and efforts to reduce the urban and rural development gap. The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of the Agropolitan Area Development policy in Wedi Village, Kapas District, Bojonegoro Regency. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. This study was analyzed using the theory of public policy implementation by Van Meter and Van Horn which included six indicators namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies of implementers, communication between organizations, and the economic, social, and political environment. Data collection techniques are used to obtain data and information through observation, interviews and documentation. While the data analysis technique uses the model of Miles and Huberman in that is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that during the implementation of the policy there were several obstacles that led to one crucial problem, namely the decrease in the production of salak fruit. This indicates that even though it has been implemented according to plan, improvements are still needed in several aspects so that the objectives of the policy can be

achieved optimally. Suggestions that can be raised are improving the quality of human resources in order to be able to manage the salak farms in an ideal manner, improve production management and technology for salak cultivation, improve the salak farm irrigation systems, strengthen agribusiness efforts by forming official business entities and optimize agro-tourism by Community Based Tourism approach.

Keywords: Implementation, Development, Agropolitan

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan nasional adalah pembangunan pada sektor ekonomi. Menurut Zhang dalam Wantu dan Moonti (2016) pada sektor pembangunan ekonomi diwujudkan melalui sektor pertanian dan perikanan dimana sektor tersebut memiliki jumlah tenaga kerja terbesar. Selanjutnya Menurut Amanor dan Cichava dalam Moonti dan Wantu (2016) sektor pertanian merupakan salah satu kunci sukses dalam sebuah pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu bangsa.

Sektor pertanian menjadi sektor yang vital dan tidak bisa dipisahkan dalam proses pembangunan nasional. Pembangunan pada sektor pertanian dilakukan melalui pembangunan pada kawasan pedesaan dimana kegiatan pertanian berlangsung. Hal ini di dukung dengan pernyataan dari Whitby dan Friedmann dalam Suroyo dan Handayani (2014) yang mengemukakan bahwa dalam proses pembangunan kawasan pedesaan hal utama yang perlu diperhatikan adalah sektor pertanian yang merupakan basis perekonomian kawasan pedesaan.

Menurut Saleh *et al* (2018) kawasan pedesaan diidentifikasi sebagai pemasok utama dari produk-produk pertanian dalam bentuk produk primer. Miyoshi dalam Pranoto *et al* (2006) mengemukakan pendapat dari Friedmann dan Douglass bahwa salah satu strategi pembangunan perdesaan yang cocok adalah supaya memperhatikan sektor pertanian sebagai *leading sector*.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan dengan meningkatkan peran sektor pertanian diwujudkan salah satunya menggunakan konsep agropolitan. Menurut Farhanah dan Prajanti (2015) konsep agropolitan diperlukan bagi negara-negara agraris seperti Indonesia. Konsep agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh Mc.Douglass dan Friedmann sebagai strategi untuk pembangunan kawasan pedesaan. Menurut Pasaribu dalam Indah *et al* (2017) Konsep agropolitan muncul karena adanya kesenjangan antara pembangunan kawasan sebagai pusat kota dan pertumbuhan ekonomi dari kawasan pedesaan sebagai pusat kegiatan pertanian.

Istilah agropolitan terdiri dari agro yang berarti pertanian dan politan atau polis yang berarti kota (Wantu dan Moonti, 2016). Menurut Friedmann (1979) secara sederhana agropolitan merupakan wilayah yang meliputi sistem produksi, distribusi, dan tata kelola wilayah. Menurut Buang *et al* (2011) Karakteristik utama dari konsep agropolitan meliputi pengembangan terintegrasi yang melibatkan sistem pendukung fisik dan kelembagaan yang lengkap dan sumber daya lokal yang optimal, integrasi dari kegiatan pertanian dan non-pertanian khususnya kegiatan berbasis dari sumber daya tersebut, dan pembangunan dari pusat pelayanan di tingkat lokal. Menurut Saleh *et al* (2018) konsep agropolitan tersebut kemudian diwujudkan dalam Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) yang digagas oleh Kementerian Pertanian sejak 2002 dan merupakan bagian dari implementasi kebijakan pembangunan nasional yang diterjemahkan hingga tingkat kabupaten.

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian. Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa meskipun terdapat industrialisasi minyak dan gas bumi, tetapi sektor pertanian masih menjadi tumpuan perekonomian masyarakat Bojonegoro (Kanal Bojonegoro, 2018). Pernyataan tersebut di dukung dengan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor primer yaitu bidang pertanian sejumlah 40% sedangkan sektor migas atau pertambangan hanya menyerap 4%. Hal ini juga diikuti dengan luas lahan yang digunakan untuk kebun, perkebunan, dan persawahan mencapai 34% dari total wilayah kabupaten. Berdasarkan faktor-faktor diatas maka kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) menjadi relevan untuk dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro.

Dengan demikian maka dikeluarkan SK Bupati Nomor 188/183A/KEP/412.12/2008 perihal penetapan Kabupaten Bojonegoro sebagai lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur. Selanjutnya lokasi yang ditunjuk adalah Kecamatan Kapas, Kecamatan Dander, Kecamatan Dander dan Kecamatan Trucuk dengan komoditi unggulan tembakau, peternakan, tebu, salak,

belimbing, jambu, perikanan budidaya, dan peternakan.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan berbagai potensi yang dimiliki oleh wilayah yang ditunjuk akan memicu peningkatan perekonomian masyarakat dan diarahkan kepada pemanfaatan dan pengelolaan sektor dan komoditas unggulan daerah melalui partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan aktifitas ekonomi dan pada akhirnya mengangkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan PAD.

Secara administratif Kecamatan Kapas terdiri dari 21 desa dan salah satunya adalah Desa Wedi yang merupakan salah satu lokasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) dengan komoditi unggulan buah salak. Desa Wedi merupakan sentra utama penghasil salak yang terluas di Kabupaten Bojonegoro dimana luas kebun mencapai 60 Ha. Keberadaan kebun salak di Desa Wedi sendiri telah ada sejak lama atau warga biasanya menyebutnya sebagai tanaman nenek moyang sehingga hampir di setiap pekarangan rumah warga terdapat kebun salak.

Sejalan dengan pengembangan kawasan agropolitan, secara garis besar terdapat 4 prospek yang dapat dijelaskan dari pengembangan penanaman salak, pertama ditinjau dari sudut usaha tani yang mengharapkan produksi buah, kedua dari prospek pemasaran yang terbuka luas, ketiga dari prospek pengembangan program wisata dengan memanfaatkan musim berbuahnya yang terus-menerus, dan keempat ditinjau dari sudut konservasi atau pengawetan tanah dan hutan alam (Anarsis, 2009).

Dalam pelaksanaannya, di Desa Wedi kebun salak dimiliki perorangan di setiap pekarangan rumah dengan luas yang berbeda-beda. Sejauh ini rata-rata masyarakat masih membudidayakan tanaman salak dengan cara yang relatif sederhana dan manual. Hal ini dikarenakan belum adanya inovasi dan teknologi modern dalam proses budidayanya. Model varietas yang ditanam adalah heterogen dalam satu petak sehingga kuantitas pada setiap varietasnya masih rendah. Jenis salak di Desa Wedi dibagi menjadi 3 macam yaitu Salak Menjalin, Salak Madu, dan Salak Kebo. Dari ketiga jenis tersebut salak menjalin yang paling diminati karena rasanya yang manis sedangkan salak kebo memiliki rasa asam dan kurang diminati. Sehingga untuk tetap memanfaatkan salak kebo dan memberikan nilai tambah pada buahnya maka dilakukan diversifikasi produk olahan salak. Olahan yang telah diproduksi

sejauh ini adalah kurma salak, madumongso salak, bakpia salak, dan dodol salak. Dengan adanya diversifikasi produk diharapkan dapat meningkatkan cita rasa produk dan memperpanjang masa simpan dari produk. Selain itu untuk mendorong promosi salak wedi, setiap tahun selalu diagendakan festival salak dengan berbagai event seperti pawai budaya, lomba gunung salak, dan sudah terdapat agrowisata salak wedi yang bisa dikunjungi oleh masyarakat, dimana agrowisata ini memiliki tujuan yang sejalan dengan agropolitan. Menurut Febriandhika (2019) adanya agrowisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, serta melibatkan masyarakat lokal secara aktif untuk terlibat dalam sektor tersebut sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Tabel 1.1 Jumlah Produksi Buah Salak di Kecamatan Kapas

Tahun	Jumlah Produksi (ton)
2016	8.550
2017	4.700
2018	2.497

Sumber: Bojonegoro Dalam Angka 2017-2019

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi tidak terlepas dari beberapa kendala diantaranya yaitu sumber daya manusia yang belum memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk mengelola kebun salak yang ideal, pengairan yang hanya mengandalkan musim hujan sehingga pada musim kemarau jumlah produksi buah salak tidak bisa maksimal, belum optimalnya agribisnis dan agrowisata yang sudah ada. Kendala tersebut diatas mengarah pada satu masalah krusial yaitu penurunan jumlah produksi buah salak. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi membutuhkan peningkatan di beberapa aspek.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan mendapat gambaran yang jelas tentang implementasi kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi. Fokus dari penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2016) yang terdiri

dari 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan subjek penelitian, melakukan observasi di lokasi pelaksanaan kebijakan yaitu mengamati secara langsung kondisi kebun salak dan sungai yang menjadi sumber pengairan, penggunaan dokumen resmi pemerintah yaitu Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Agropolitan Tahun 2019, Bojonegoro dalam Angka, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bappeda dan data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari jurnal dan buku. Sedangkan teknik analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini dipilih dengan *purposive sampling* yaitu pihak yang dianggap mengerti dan paham serta terlibat langsung dalam proses implementasi yang ini terdiri dari Bappeda dan petani salak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui gambaran mengenai implementasi kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 indikator yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2012) ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan kebijakan realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan (Agustino, 2016).

Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka untuk mendukung peningkatan potensi kawasan pedesaan berbasis tanaman hortikultura sekaligus sebagai upaya untuk memperkecil kesenjangan pembangunan perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya

tujuan tersebut dirumuskan menjadi visi agropolitan Kabupaten Bojonegoro yaitu Terwujudnya Kawasan Agropolitan yang Modern, Berkelanjutan, dan Memiliki Daya Saing sehingga Mampu Mensejahterakan Masyarakat Pedesaan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi terus dilakukan pembangunan secara bertahap. Kebun salak di Desa Wedi dimiliki perorangan dan berada di pekarangan rumah dengan luas yang berbeda-beda, hal ini berkaitan dengan tata kelola kebun salak tersebut yang dikelola secara mandiri sehingga seringkali kurang ideal. Selanjutnya Pemerintah Desa Wedi saat ini berinisiatif untuk menyediakan tanah kas desa yang nantinya diharapkan akan menjadi kebun percontohan untuk pengelolaan kebun salak yang ideal. Selanjutnya pengairan untuk kebun salak mengandalkan sungai-sungai di Desa Wedi yang memiliki debit maksimal hanya di musim penghujan dan untuk membersihkan sungai agar proses irigasi kebun salak menjadi lebih lancar maka dilakukan juga normalisasi sungai, tetapi pada saat musim kemarau sungai yang menjadi sumber pengairan tersebut menjadi kering sehingga tidak bisa mengairi kebun secara maksimal. Salak di Desa Wedi dijual melalui usaha-usaha yang dibentuk oleh masyarakat dan terus dirintis untuk menjadi UMKM, salak yang ditanam dalam satu kebun heterogen tidak seimbang antar varietasnya. Penjualan salak tidak hanya dalam buah segar saja tetapi juga dijual dalam berbagai produk olahan salak seperti kurma salak, madumongso salak, bakpia salak dan dodol salak. Permintaan yang datang cukup tinggi tetapi seringkali tidak bisa terpenuhi dan harus membeli dari luar Desa wedi karena produksi salak hanya bisa maksimal pada triwulan IV yang merupakan musim penghujan. Menurut Yuni (2016) Hasil produksi yang terbatas ini juga terjadi di kawasan pengembangan agropolitan lainnya salah satunya yaitu di Desa Ngringinrejo dengan komoditi buah belimbing. Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan ini dilaksanakan secara berkelanjutan dan diarahkan pada pengembangan agrowisata, di Desa Wedi sendiri sudah memiliki Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan lokasi agrowisata yang mendapatkan respon baik dari masyarakat. Pembangunan infrastruktur juga turut dikembangkan misalnya pembangunan gapura, perbaikan akses jalan, sarana dan prasarana agrowisata.

Selama pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di Desa Wedi terdapat beberapa masalah yang menyebabkan tujuan dari kebijakan tersebut belum tercapai secara maksimal. Permasalahan tersebut mengarah pada produktivitas yang belum optimal, sehingga menyebabkan jumlah produksi salak menurun dan berdampak pada belum meningkatnya perekonomian kelompok sasaran di Desa Wedi. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani salak diperoleh hasil bahwa dengan adanya kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi ini belum mampu untuk meningkatkan perekonomian secara signifikan, hal ini dikarenakan harga jual salak yang tidak tinggi sehingga pendapatan dari penjualan salak tidak maksimal. Dengan adanya hal tersebut maka dapat dilihat bahwa tujuan kebijakan yaitu mensejahterakan masyarakat pedesaan belum bisa tercapai secara maksimal.

Sejalan dengan munculnya beberapa permasalahan, para pelaksana kebijakan juga telah merumuskan beberapa strategi agar tujuan atau visi dan misi kebijakan bisa tercapai. Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi dengan komoditi unggulan salak akan dikembangkan dari hulu ke hilir, yaitu *on farm*, *off farm*, dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Mahi dalam Fatihin (2016) meskipun dalam suatu kawasan agropolitan pasti memiliki komoditi unggulan tetapi yang harus diperhatikan tidak hanya pada aspek budidaya (*on farm*) saja melainkan juga aspek *off farm*. Hal ini meliputi pengadaan sarana dan prasarana pertanian yaitu bibit dan pupuk, kegiatan pengolahan hasil pertanian yaitu membuat produk olahan untuk memberikan nilai tambah, kegiatan pemasaran hasil pertanian, dan juga kegiatan penunjang yaitu agrowisata.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Selain sumberdaya manusia, sumber daya lainnya yang perlu dipertimbangkan juga adalah sumber dana finansial dan sumber daya waktu (Agustino, 2016).

Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan dilaksanakan dengan sumber dana yang

berasal dari APBD Kabupaten Bojonegoro dan juga APBDes. Dalam pelaksanaannya di Desa Wedi dana tersebut dialokasikan untuk rencana kegiatan pengembangan kawasan yaitu penataan kawasan, kelembagaan, pemasaran, peningkatan dan kualitas. Akan tetapi saat ini di Desa Wedi semua proses pengembangan kawasan agropolitan dari dana tersebut masih belum dilaksanakan seluruhnya dan akan dilakukan pembangunan secara bertahap. Sejak ditetapkan, wujud pembangunan yang sudah dilaksanakan di Desa Wedi adalah gapura pintu masuk desa, perbaikan jalan aspal dan pemasangan paving, dan pembangunan sarana dan prasarana kawasan agrowisata seperti gazebo dan gapura wisata salak wedi.

Selain sumber daya finansial dalam kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di Desa Wedi ini melibatkan sumber daya manusia dari beberapa pihak yang bersinergi dan menjalankan perannya masing-masing. Untuk melaksanakan kebijakan ini dibentuk sebuah kelompok kerja (POKJA) Pengembangan Kawasan Agropolitan yang terdiri dari Bappeda yang bertindak sebagai fasilitator dan perencanaan, Dinas Pertanian yang berperan untuk menangani *on farm*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berperan di bidang agrowisata, serta Pemerintah Desa Wedi. Selain dari pihak pelaksana juga terdapat kelompok sasaran yaitu para petani salak, tetapi untuk jumlah dari petani di Desa Wedi belum ada data yang jelas. Selanjutnya juga terdapat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk memaksimalkan agrowisata salak di Desa Wedi. Dalam proses pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan menggunakan konsep partisipasi dan pemberdayaan kelompok sasaran. Akan tetapi, terdapat beberapa kelompok sasaran yang masih belum memahami pengelolaan kebun salak yang ideal.

Perihal sumber daya waktu, di Desa Wedi sendiri sejak digagas tahun 2008, para pelaksana mulai mengembangkan dari tahun 2010-2013 yaitu memulai pengembangan salak mulai penanaman dan pemeliharaan, pembangunan koridor wisata, perbaikan akses jalan, pengadaan sarana pengolahan hasil, pelatihan pengolahan hasil. Selanjutnya pada tahun 2015 Pengembangan Kawasan Agropolitan diperkuat dengan melibatkan tenaga ahli pendamping kawasan agropolitan. Pendampingan ini kemudian dituangkan dalam masterplan agropolitan yang akan menjadi acuan pengembangan selanjutnya dalam aspek seperti budidaya, infrastruktur, wisata dan pemasaran

produk. Pada tahun 2018 masih berlangsung sama yaitu melanjutkan pendampingan dan mengembangkan kawasan agropolitan menjadi lebih tertata, memperbaiki sarana pendukung, dan nilai tambah produk dari sisi pemasaran baik penjualan berupa buah maupun olahan, serta semakin memperkuat pembangunan agrowisata.

Dengan demikian, sumber daya merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi. Sumber daya yang tersedia harus dikelola dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tujuan dari kebijakan bisa tercapai. Iqbal dan Anugrah (2009) menyatakan bahwa tiga indikator utama sebagai representasi keberhasilan target atau sasaran implementasi kebijakan agropolitan adalah pembangunan sarana prasarana, sistem dan usaha agribisnis, dan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Lestari (2017) untuk mengembangkan suatu kawasan sektor-sektor yang ada harus mendukung. Sebaik apapun sarana dan prasarana juga tidak akan bermanfaat apabila yang menggunakan hanya sedikit atau jarang digunakan. Sebaik apapun kualitas manusianya tanpa ditunjang sarana juga akan sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga keterkaitan semua unsur mutlak diperlukan untuk mengembangkan suatu kawasan. Suatu kebijakan yang paling utama adalah ditujukan untuk manusia, jadi konsep *human framework dan basic needs* harus melekat pada perencanaan-perencanaan program pengembangan suatu kawasan .

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga diperhitungkan saat akan menentukan agen pelaksana (Agustino, 2016). Agen pelaksana terdiri dari badan atau instansi yang bertanggung jawab dan memiliki peran langsung terhadap pelaksanaan sebuah kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan agen pelaksananya disebut sebagai Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan atau disingkat sebagai Pokja PKA. Agen pelaksana di Desa Wedi

terdiri dari Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Pemerintah Desa Wedi. Para pelaksana tersebut berperan atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Karakteristik yang ditunjukkan oleh Bappeda selama melaksanakan perannya yaitu melakukan pendampingan langsung yang dilaksanakan secara disiplin dan rutin berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pelaksanaan kegiatan setiap tahun anggaran. Karakteristik Dinas Pertanian adalah cenderung solutif dan reaktif terhadap permasalahan *on farm*, salah satu bentuknya adalah melakukan normalisasi sungai sebagai solusi untuk memperbaiki sistem irigasi kebun salak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan pihak yang bertanggung jawab atas proses perkembangan kawasan agropolitan menuju kawasan agrowisata, karakteristik yang ditunjukkan adalah insiatif dan solutif yaitu dengan membentuk Pokdarwis agar memaksimalkan konsep pemberdayaan dan partisipasi dari masyarakat. Selanjutnya Pokdarwis juga memiliki karakteristik tersendiri yaitu proaktif dan komunikatif untuk menjadi penggerak dalam upaya untuk menciptakan kesadaran kepada para petani salak untuk terus mengelola kebun salaknya dengan benar. Pemerintah Desa Wedi memiliki karakteristik yang ramah terutama pada petani salak karena dipengaruhi kedekatan sesama warga, hal ini memudahkan komunikasi dalam satu kawasan pengembangan agropolitan yaitu di Desa Wedi. Secara keseluruhan antara pelaksana dan kelompok sasaran tentunya telah memiliki kontak masing-masing sehingga karakteristik yang muncul adalah komunikatif antara satu sama lain dan juga komunikasi berjalan lebih fleksibel. Karakteristik tersebut dibutuhkan karena akan mempermudah proses koordinasi antar pihak.

Berdasarkan karakter-karakter yang muncul dari pelaksana tersebut dianggap cocok atau tepat untuk pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi. Selanjutnya kelompok sasaran juga mengharapkan karakteristik tersebut tetap dipertahankan oleh pelaksana dan terus ditingkatkan agar kebijakan bisa terlaksana lebih baik lagi.

4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap penerimaan dan penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi sebuah kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi karena

kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil dari formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang masyarakat ingin selesaikan (Agustino, 2016).

Selama pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi, sikap dari para pelaksana yaitu Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Pemerintah Desa Wedi yang tergabung dalam Pokja Agropolitan menunjukkan sikap yang menerima sejak awal hadirnya kebijakan tersebut sampai pelaksanaannya, sikap menerima tersebut dapat dilihat dari pelaksana yang melaksanakan perannya masing-masing sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama kelompok sasaran yaitu petani salak yang menyebutkan bahwa selama ini sikap dari pelaksana sangat terbuka dengan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Pelaksana menerima laporan dari kondisi di lapangan yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi agar kebijakan bisa berjalan lebih baik di masa mendatang. Meskipun terdapat kendala di lapangan dan hasil serta tujuan belum tercapai secara maksimal, para pelaksana tidak serta merta menolak kebijakan tetapi memilih untuk mengkoordinasikannya agar bisa memecahkan permasalahan.

Dengan adanya sikap yang menerima dan mendukung dari para pelaksana dapat dilihat bahwa terdapat komitmen yang serius dari para pelaksana untuk melaksanakan perannya agar tujuan kebijakan tercapai. Sikap yang positif tersebut mendukung dirumuskannya strategi-strategi baru sebagai solusi untuk berbagai macam kendala yang terjadi di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat sikap para pelaksana yang menerima kehadiran kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi agar bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Apabila pelaksana tidak menunjukkan sikap yang mendukung atau justru terkesan menolak maka akan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan kebijakan tersebut.

5. Komunikasi Antarorganisasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan sebaliknya (Agustino, 2016). Dalam pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi para pelaksana yang tergabung dalam Pokja PKA dan terdiri dari Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Pemerintah Desa Wedi selalu melakukan koordinasi satu sama lain dan juga bersama dengan kelompok sasaran yaitu petani salak.

Para pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran bersama-sama saling berkoordinasi untuk melaksanakan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan. Pelaksanaan kebijakan berdasarkan rencana kegiatan yang sudah dirumuskan oleh Bappeda setelah berkoordinasi dengan pelaksana lainnya maka kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan dilaksanakan selama satu tahun anggaran, hal ini dikarenakan dana yang digunakan dalam kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan ini menggunakan APBD sehingga harus sesuai dengan tahun anggaran. Selanjutnya juga dilaksanakan monitoring dan evaluasi baik rapat koordinasi skala kecil atau rapat koordinasi besar. Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dari berbagai aspek mulai dari kendala di lapangan dan alokasi dana yang digunakan. Sedangkan perihal jadwal dari rapat tersebut tidak disebutkan secara jelas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pelaksana dan kelompok sasaran didapatkan hasil bahwa terdapat sinkronisasi permasalahan yang terjadi. Kendala yang disampaikan oleh pelaksana dan kendala yang disampaikan oleh kelompok sasaran sama. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat koordinasi yang baik antara pelaksana dan kelompok sasaran. Meskipun terdapat berbagai macam kendala dan tujuan masih belum tercapai secara maksimal tetapi koordinasi yang baik sangat dibutuhkan agar kebijakan bisa terus berjalan dan mengalami perbaikan.

Dengan adanya koordinasi yang lancar antara pihak pelaksana dan kelompok sasaran maka semua pihak berhasil mengidentifikasi kendala yang sama di lapangan dan selanjutnya bisa dirumuskan strategi yang tepat guna untuk menyelesaikan kendala tersebut secara bertahap.

Friedmann dan Weaver dalam Iqbal dan Anugrah (2009) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi beberapa persyaratan dimana salah satu diantaranya adalah harus memiliki kekuatan komitmen koordinasi dan tidak tergantung sepenuhnya pada keputusan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi baik antara pelaksana dan pelaksana atau antara pelaksana dan kelompok sasaran merupakan hal yang harus dibangun dengan baik sehingga bisa membuat keputusan yang tepat sesuai kondisi di lapangan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Agustino, 2016).

Dari segi ekonomi, kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Bojonegoro ini menunjuk kawasan yang memiliki komoditas unggulan dan potensial untuk dikembangkan sehingga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok sasaran. Di Desa Wedi sendiri mayoritas petani salak memiliki kondisi ekonomi menengah kebawah. Kebijakan ini hadir dengan harapan dapat membantu para petani salak agar mampu memanfaatkan kebun salak yang dimilikinya dengan mengelola secara ideal agar bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan salak baik dalam bentuk buah maupun olahan. Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan ini tidak memberikan bantuan finansial secara langsung kepada para petani salak melainkan diarahkan pada partisipasi dan pemberdayaan sehingga kebijakan ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dari segi sosial, para kelompok sasaran yaitu pemilik kebun salak atau petani salak masih belum memiliki kesadaran yang cukup untuk mengelola kebunnya dengan benar, bahkan sebagian pemilik kebun salak mulai menjual atau menggunakan lahan kebun salaknya untuk dibangun menjadi rumah dan bangunan lainnya, hal ini dikarenakan semua kebun salak masih kepemilikan pribadi. Selain itu terdapat pemilik kebun salak yang enggan merawat kebun salaknya sehingga pohon

salak banyak yang kering dan mati. Tindakan tersebut berdampak pada semakin menyempitnya lahan kebun salak dan juga berdampak pada berkurangnya hasil produksi buah salak di Desa Wedi. Alih fungsi lahan juga disebabkan oleh proses perkembangan wilayah dan kebutuhan pergerakan masyarakat.

Dari segi politik, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan komitmen penuh terhadap kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan. Hal ini dibuktikan dengan sejak dikeluarkannya SK Bupati Nomor 188/183A/KEP/412.12/2008 pada tahun 2009-2013 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan agropolitan dalam visi, misi, dan prioritas pembangunan. Selanjutnya pada periode tersebut sudah terdapat masterplan agropolitan, program utama pada kawasan agropolitan, serta rencana aksi pada kawasan agropolitan. Pada tahun selanjutnya kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan mengalami perkembangan yaitu menetapkan beberapa wilayah baru yang dinilai potensial dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Meskipun terjadi pergantian kepala daerah di Kabupaten Bojonegoro, kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan tetap mendapatkan perhatian penuh, hal ini dibuktikan dengan munculnya strategi-strategi baru yang disesuaikan dengan pedoman umum, Analisis SWOT, Indeks PKA, dan Pengalaman empiris dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memandang bahwa agropolitan ini sebagai komitmen bersama dalam pengelolaan pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025.

Di masa mendatang diharapkan lingkungan ekonomi, sosial dan politik bisa menciptakan kondisi yang tetap kondusif sehingga bisa mendukung pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan agar bisa mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn didapatkan kesimpulan sebagai berikut, pertama dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan yaitu dari tujuan yang telah dirumuskan

dalam visi agropolitan Kabupaten Bojonegoro meskipun telah dilaksanakan selama beberapa tahun masih terdapat kendala di lapangan yaitu produktivitas yang belum optimal dimana hal tersebut mengarah pada penurunan jumlah produksi buah salak sehingga tujuan dari kebijakan belum tercapai secara maksimal, kedua dari indikator sumberdaya yaitu finansial, waktu, dan manusia dimana sumber daya manusia khususnya kelompok sasaran membutuhkan peningkatan tentang pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola kebun salak yang ideal, ketiga dari indikator karakteristik agen pelaksana yaitu pelaksana berkomitmen serta aktif untuk melaksanakan perannya masing-masing dan juga menunjukkan sikap yang responsif terhadap permasalahan yang muncul selama pelaksanaan, keempat dari indikator sikap dan kecenderungan para pelaksana yaitu para pelaksana menunjukkan sikap yang menerima dan mendukung dilaksanakannya kebijakan hal ini dapat dilihat dari dirumuskannya strategi-strategi baru sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi, kelima dari indikator komunikasi antarorganisasi yaitu antara para pelaksana yang tergabung dalam Pokja memiliki komunikasi yang cukup baik dengan kelompok sasaran dimana kedua pihak memiliki satu suara dalam mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan, dan keenam dari indikator kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik sangat berpengaruh selama pelaksanaan program dimana dari segi ekonomi kebijakan ini sangat relevan untuk diterapkan karena adanya sesuai antara tujuan dan kondisi di kawasan agropolitan, selanjutnya dari segi sosial masih dibutuhkan partisipasi kelompok sasaran agar bisa melaksanakan rencana pengembangan kawasan dengan ideal, dan dari segi politik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengkaji dan mengembangkan kebijakan ini secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan kebijakan implementasi pengembangan kawasan agropolitan di Desa Wedi sudah dilaksanakan cukup baik tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga pelaksanaan kebijakan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Hal ini berarti diperlukan perbaikan di beberapa aspek sehingga di masa mendatang kebijakan bisa dilaksanakan dengan lebih baik.

Saran

Melihat pembahasan dan simpulan yang telah dibuat terkait implementasi kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi

terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan berdasarkan permasalahan yang muncul, hal ini dimaksudkan agar kebijakan bisa dilaksanakan lebih baik di masa mendatang, berikut ini adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengoptimalkan pendekatan dan partisipasi kepada kelompok sasaran agar memiliki kesadaran, pengetahuan, dan ketrampilan yang mumpuni untuk mengelola kebun salak ideal melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) berjenjang serta berkelanjutan.
2. Meningkatkan manajemen produksi dan teknologi budidaya yang meliputi penataan kebun salak, pemilihan bibit unggul, pemberian pupuk, cara pengawinan dan penyerbukan, hingga pemanenan.
3. Melakukan perbaikan sistem irigasi kebun salak dengan mengoptimalkan gerakan normalisasi sungai serta menganalisis kemungkinan untuk membuat sumber pengairan baru agar tidak ketergantungan terhadap satu sumber air saja.
4. Mengembangkan kelembagaan agribisnis dengan membentuk badan usaha resmi atau koperasi salak dan mengoptimalkan agrowisata salak dengan konsep *Community Based Tourism* untuk mewujudkan agrowisata yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia memberikan bantuan dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

1. Bapak dan Ibu dosen S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
2. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi
3. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji skripsi
4. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. selaku dosen penguji skripsi
5. Dan pihak-pihak lainnya yang turut memberikan dukungan kepada peneliti sehingga penyusunan jurnal ini bisa berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung:Alfabet.
- Anarsis, Widji. 2009. *Agribisnis Komoditi Salak*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia

- Bappeda Kabupaten Bojonegoro. 2019. Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Agropolitan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019.
- Buang, A., Habibah, A., Hamzah, J., Ratnawati, Y.S. (2011). The Agropolitan Way of Re-Empowering the Rural Poor, *World Applied Sciences Journal*, 13, 1-6.
- Farhanah, L., & Prajanti., S.D.W. (2015). Strategies in Developing Agropolitan Areas in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 16(2), 158-165.
- Fatihin, Khoirul. (2016). Studi Perbandingan Tentang Ketimpangan Hasil Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan (Perbandingan Kawasan Budidaya Agropolitan di Desa Ngringinrejo dan Desa Wedi Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(3), 1-13.
- Febriandhika, I., Kurniawan, T. (2019). Membingkai Konsep Pariwisata yang Berkelanjutan Melalui *Community-Based Tourism*: Sebuah Review Literatur. *Journal of Public Sector Innovations*, 3(2), 50-56.
- Friedmann, J. (1979). Basic Needs, Agropolitan Development, and Planning from Below. *World Development*, 7, 607-613.
- Indah, P.N., Sam, Z.A., Damajati, E. (2017). Identifying Potential Estate Commodity for Agropolitan Development in Ponorogo. *International Journal of Agriculture System*, 5(1), 60-68.
- Iqbal, M., & Anugerah, I.S. (2009). Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah, *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7, 169-188.
- Kanal Bojonegoro. 2018. *Sektor Pertanian Jadi Tumpuan Ekonomi Warga Bojonegoro*. <https://www.kanalbojonegoro.com/sektor-pertanian-jadi-tumpuan-ekonomi-warga-bojonegoro/>, Diakses pada 11 November 2019.
- Lestari, S.E., Suryono, A., Domai, T. (2017). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Pacitan. *Journal of Public Sector Innovations*, 2(1), 10-16.
- Pranoto, S., Ma'arif, M.S., Sutjahjo, S.H., Siregar, H. (2006). Pembangunan Perdesaan Berkelanjutan Melalui Model Pengembangan Agropolitan. *Jurnal Manajemen dan Agribisnis*, 3(1), 1-10.
- Saleh, H., Musa, C.M., Azis, M. (2018). Development of Agropolitan Area Based On Local Economic Potential: A Case Study of Belajen Agropolitan Area, Enrekang District. *Journal of Research & Method in Education*, 8(2), 1-11.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suroyo, B.T., & Handayani, W. (2014). Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25(3), 243-261.
- Wantu, M.S., & Moonti, U. (2016). Corn Agropolitan for Great Gorontalo Indonesia. *Research Journal of Applied Science*, 11(9), 866-869.
- Yuni, S.W., & Tauran. (2016). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Ringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Publika*, 4(7), 1-10.